

BAB III

HAK ASASI MANUSIA DAN HAMBATAN AKSESI TURKI KE UNI EROPA

3.1.Hak Asasi Manusia dan Hambatan Aksesinya Turki ke Uni Eropa Tahun 2010-2016

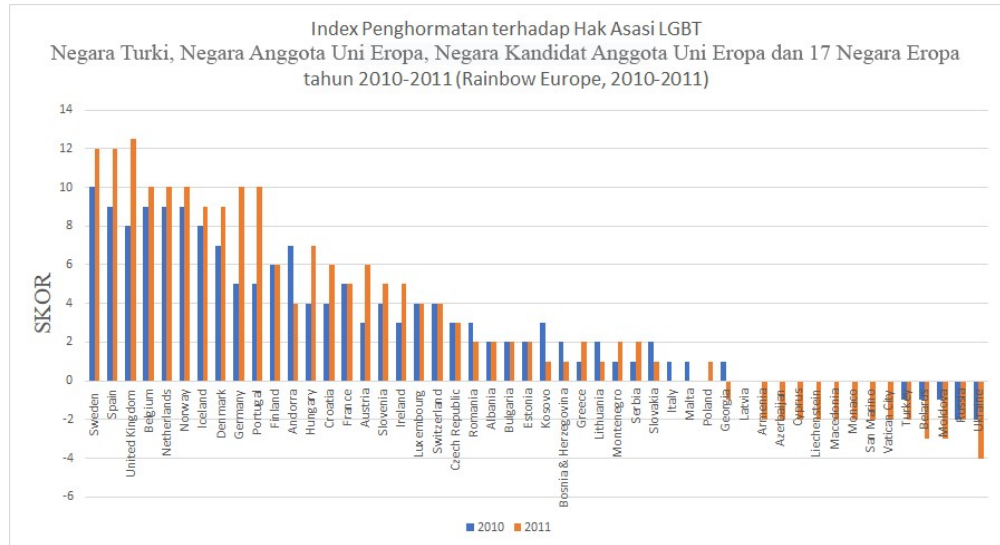
Berdasarkan Kriteria Kopenhagen 1993, komisi Uni Eropa menetapkan adanya jaminan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia sebagai salah satu dari kriteria politik yang harus dipenuhi sebagai persyaratan untuk aksesinya ke Uni Eropa (European Integration online Papers, 2018). Hal ini didukung dengan perspektif Liberalisme dalam ilmu hubungan internasional yang menjelaskan bahwa kerjasama internasional/regional dapat dilakukan jika suatu negara dapat melindungi hak asasi manusia termasuk hak-hak kaum minoritas. Menurut perspektif Liberalisme, hambatan dalam kerjasama internasional/regional dapat terjadi karena permasalahan hak asasi manusia. Sejak tahun 2010-2016, Uni Eropa menemukan permasalahan hak asasi manusia yang menghambat aksesinya Turki ke Uni Eropa. Di sisi lain, berbagai upaya telah dilakukan oleh Turki untuk menyelesaikan permasalahan hak asasi manusia agar segera disetujui untuk bergabung ke dalam anggota Uni Eropa. Bab ini membahas berbagai temuan Uni Eropa mengenai permasalahan hak asasi manusia di Turki dan upaya yang dilakukan Turki dalam menyelesaikan permasalahan hak asasi manusia sekaligus berbagai respon Uni Eropa terhadap upaya yang telah dilakukan oleh Turki untuk menyelesaikan permasalahan hak asasi manusia yang terdiri dari 3 parameter, yaitu hak asasi terhadap LGBT, kebebasan pers/media dan kebebasan dasar beragama.

3.1.1. Upaya dan Hasil yang dicapai Turki untuk menyelesaikan permasalahan Hak Asasi Manusia Tahun 2010-2011

Demi menghormati hak asasi manusia, Turki melakukan upaya untuk menjamin hak-hak penyandang cacat dalam bekerja dan mendapatkan pekerjaan. Turki berhasil menekan angka pengangguran di kalangan penyandang cacat. Komisi Eropa mencatat bahwa jumlah pengangguran di kalangan penyandang cacat pada usia produktif (15-64 tahun) Turki adalah 32,7%, lebih kecil jika dibandingkan rata-rata 28 negara anggota Uni Eropa yang mencapai 48,5% (EuroStat, 2011). Namun Uni Eropa masih menemukan berbagai permasalahan Hak Asasi Manusia di Turki (Turkey Progress Report, 2010).

Uni Eropa menemukan masalah diskriminasi dan stereotip negatif terhadap LGBTT (*Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, dan Transvestite*) yang terus berlanjut (Turkey Progress Report, 2011). Di lingkungan kerja militer, angkatan bersenjata Turki masih memiliki peraturan kesehatan yang mendefinisikan homoseksualitas (*Gay*) sebagai penyakit 'psikoseksual' dan menyatakan homoseksual tidak layak untuk dinas militer. Dinas militer yang dinyatakan homoseksual harus menjalani pemeriksaan medis yang memalukan. Pria gay harus menjalani pemeriksaan dubur dan menyediakan bahan foto diri mereka selama hubungan seksual untuk membuktikan homoseksualitas mereka (Schnepf,

2017). Ketika seorang pria telah terbukti sebagai gay maka dalam catatan medisnya dinyatakan positif gay (Hutley, 2015).



Grafik 1. Index Penghormatan terhadap Hak Asasi LGBT Negara Turki, Negara Anggota Uni Eropa, Negara Kandidat Anggota Uni Eropa dan 17 Negara Eropa tahun 2010-2011 (Rainbow Europe, 2010-2011)

Berdasarkan grafik di atas, dalam hal penghormatan terhadap hak asasi LGBT, Turki menempati peringkat terendah dibandingkan dengan 28 negara anggota Uni Eropa dan peringkat ke 46 dibandingkan 49 negara-negara Eropa pada tahun 2010 (Rainbow Europe, 2010). Sedangkan pada tahun 2011, Turki masih menempati peringkat terendah dibandingkan dengan 28 negara anggota Uni Eropa dan peringkat ke 47 dari 49 negara-negara Eropa dalam hal penghormatan terhadap hak asasi LGBTT (Rainbow Europe, 2011). Secara keseluruhan, upaya harus terus dilakukan untuk memerangi diskriminasi terhadap LGBTT (Turkey Progress Report, 2010).

Uni Eropa juga menemukan permasalahan dalam kebebasan pers di Turki. Turki menempati peringkat terendah dibandingkan 28 negara anggota Uni Eropa dan menempati peringkat 138 dari 178 negara di seluruh dunia dalam hal kebebasan pers (World Press Freedom Index, 2010).

No.	Negara	Peringkat	
		2010	2011
1	Finland	1	1
2	Netherlands	2	4
3	Austria	7	5
4	Estonia	9	3
5	Sweden	3	12
6	Luxembourg	14	7
7	Denmark	11	11
8	Ireland	9	15
9	Belgium	14	20
10	Germany	17	18
11	Czech Rep	23	14
12	Lithuania	11	31
13	United Kingdom	19	28
14	Poland	32	24
15	Cyprus	45	16
16	Slovakia	35	27
17	Hungary	23	40
18	Malta	14	58
19	Portugal	40	33
20	Spain	39	39
21	Latvia	30	50
22	France	44	38
23	Slovenia	46	36
24	Romania	52	49
25	Italy	49	61
26	Croatia	62	68
27	Greece	70	71
28	Bulgaria	70	81
29	Macedonia	68	94
30	Serbia	85	80
31	Albania	80	96
32	Montenegro	104	107

33	Turkey	138	148
----	--------	-----	-----

Tabel 1. Peringkat Kebebasan Pers Negara Turki, Negara Anggota Uni Eropa dan Negara Kandidat Anggota Uni Eropa tahun 2010-2011 (World Press Freedom Index, 2010-2011)

Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2010-2011 Turki menempati peringkat terendah dibandingkan negara anggota Uni Eropa dan negara kandidat anggota Uni Eropa. Negara anggota Uni Eropa yang menempati peringkat terendah adalah Bulgaria dengan peringkat 70 dan 81 dari 178 negara di dunia. Sedangkan negara kandidat anggota Uni Eropa yang menempati peringkat terendah adalah Montenegro dengan peringkat 104 dan 107 dari 178 negara di dunia. Turki menempati peringkat jauh di bawah Bulgaria dan Montenegro, yakni dengan peringkat 138 dan 148 dari 178 negara di dunia. Hal ini disebabkan oleh proliferasi tuntutan hukum, penahanan, dan hukuman pengadilan yang menargetkan wartawan (World Press Freedom Index, 2010). Uni Eropa mencatat enam wartawan bersama dengan pegawai militer lainnya ditangkap terkait rencana kudeta yang gagal bernama *cage plan* pada bulan Maret 2009. Mereka menghadapi prosekusi dan pengadilan tertutup yang rentan terjadi ketidakadilan (Turkey Progress Report, 2010). Ditambah lagi dengan kondisi begitu maraknya pemblokiran pers, media dan situs web oleh pemerintah Turki. Pada tahun 2009, Turki melakukan pemblokiran akses terhadap 32.000 website (Turkey Progress Report, 2013). Sedangkan menurut Freedom on the Net (2011), Turki melakukan

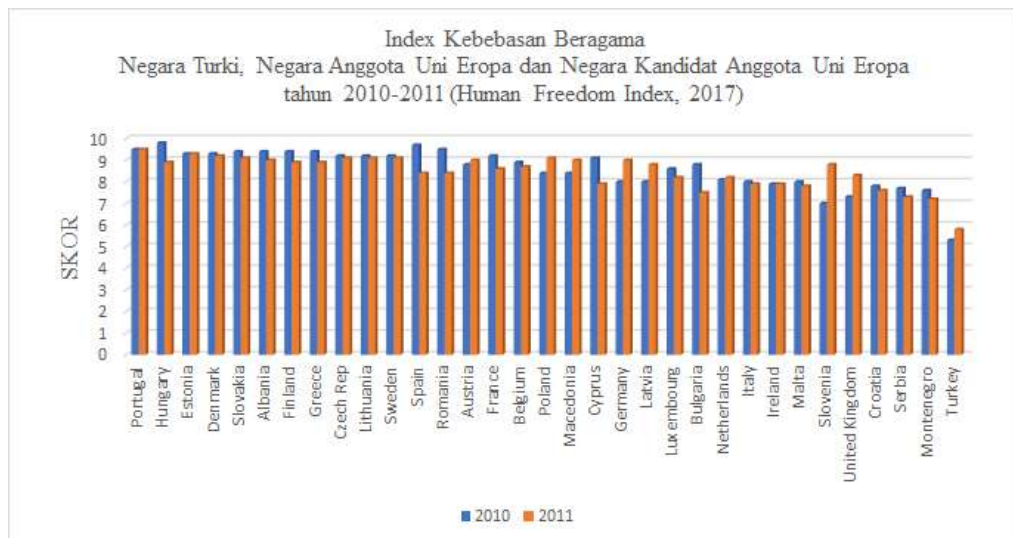
pemblokiran akses terhadap 5.000 situs website hingga Juli 2010. Dalam hal ini, Uni Eropa menilai Turki belum mampu menjamin kebebasan berekspresi dan hak warga negara untuk mengakses informasi (Turkey Progress Report, 2010). Pemblokiran web/situs ini berkaitan dengan ujaran kebencian yang mengarah kepada penghinaan terhadap pemerintah Turki yang dilakukan oleh pengguna internet (Mandiri, 2014). Menurut Stockholm Center for Freedom (2018), selama tahun 2010 hingga tahun 2017 terdapat 12.893 kasus ujaran kebencian yang mengarah kepada penghinaan terhadap presiden Erdogan. Sebanyak 6.033 orang dituntut ke pengadilan karena melakukan penghinaan terhadap presiden Erdogan (Stockholm Center for Freedom, 2018). Rifat Çetin, divonis 1 tahun penjara karena tuduhan melakukan penghinaan terhadap Erdogan melalui sebuah gambar yang menggambarkan presiden Erdogan seperti tokoh animasi fiksi buruk rupa bernama Gollum dalam serial film *Lord of The Rings* (BBC News, 2016).



Gambar 1. Erdogan – Gollum (Foreign Policy, 2015).

Uni Eropa menilai Turki belum menjamin kebebasan berekspresi (Turkey Progress Report, 2010). Pada tahun 2011, Turki menempati peringkat 148 dari 178 negara di seluruh dunia dalam hal kebebasan pers. Atau turun 10 peringkat dibandingkan tahun 2010 (World Press Freedom Index, 2011). Secara keseluruhan, Uni Eropa menilai Turki belum menjamin kebebasan pers dan media, kebebasan berekspresi dan hak warga negara untuk memperoleh akses informasi (Turkey Progress Report, 2010).

Sedangkan dalam hal penghormatan terhadap kebebasan beragama, Turki menempati peringkat terendah dibandingkan dengan 28 negara anggota Uni Eropa pada tahun 2010 (Human Freedom Index, 2015). Pada tahun 2011, Turki masih menempati peringkat terendah dibandingkan dengan 28 negara anggota Uni Eropa (Human Freedom Index, 2015).



Grafik 2. Index Kebebasan Beragama Negara Turki, Negara Anggota Uni Eropa dan Negara Kandidat Anggota Uni Eropa tahun 2010-2011 (Human Freedom Index, 2017)

Berdasarkan grafik di atas, pada tahun 2010-2011 Turki selalu menempati peringkat terendah dalam hal kebebasan beragama dibandingkan 28 negara anggota Uni Eropa dan negara kandidat anggota Uni Eropa (Human Freedom Index, 2017). Skor rata-rata Turki selama tahun 2010-2011 hanya sebesar 5,55, selisihnya cukup besar jika dibandingkan skor rata-rata negara anggota Uni Eropa yang mencapai 8,67 dan skor rata-rata negara kandidat anggota Uni Eropa yang mencapai 8,2. Uni Eropa mencatat terjadinya diskriminasi terhadap komunitas non-muslim di Turki. Uni Eropa menemukan sebanyak dua kasus diskriminasi pemerintah Turki terhadap komunitas agama Alevis berupa penolakan pemberian izin serta ketidakpastian administrasi dalam pembangunan tempat ibadah komunitas agama Alevis (Turkey Progress Report, 2010). Kelompok agama Saksi Yehuwa menghadapi diskriminasi terkait tempat ibadah. Kelompok agama Saksi Yehuwa menghadapi klaim pajak oleh pemerintah kota Istanbul dan Ankara. Otoritas kota itu mengirimkan tuntutan untuk pembayaran pajak properti untuk tempat ibadah mereka. Menurut Uni Eropa, seharusnya tempat ibadah dibebaskan dari pajak properti (Turkey Progress Report, 2010).

3.1.2. Upaya dan Hasil yang dicapai Turki untuk menyelesaikan permasalahan Hak Asasi Manusia Tahun 2012-2014

Turki melakukan upaya untuk menjamin hak asasi manusia. Pada tahun 2014, Turki melakukan pelatihan tentang Hak Asasi Manusia terhadap para sipir dan petugas yang bekerja di rumah tahanan/penjara. Hal itu bertujuan untuk menjaga keamanan rumah tahanan dari kerusuhan yang dilakukan oleh tahanan. Mereka juga memperhatikan kesehatan dan kelayakan rumah tahanan dan kondisi kesehatan para tahanan. Turki juga melakukan pelatihan tentang Hak Asasi Manusia terhadap para aparat penegak hukum. Mereka diharapkan mampu mengendalikan situasi dan kondisi jika setiap saat terjadi demonstrasi agar tidak berujung kekerasan dan terjadi pelanggaran hak asasi manusia (Turkey Progress Report, 2014). Uni Eropa mengapresiasi langkah tersebut, namun masih ditemukan berbagai permasalahan hak asasi manusia di Turki.

Pada tahun 2012-2014, Uni Eropa menemukan permasalahan dalam kebebasan pers berhubungan dengan profesi wartawan di Turki (Turkey Progress Report, 2013). Menurut Index of Censorship (2019) terjadi beberapa kasus pembunuhan terhadap wartawan dan pegawai media selama tahun 2014. Pegawai media Kadri Bağdu dibunuh pada Oktober 2014 saat mengantarkan surat kabar Kurdi bernama Azadiya Welat dan Özgür Gündem di Seyhan, provinsi Adana sebelah tenggara. Dia ditembak lima kali oleh dua orang yang kemudian melarikan diri dari sebuah sepeda

motor. Serena Shim, seorang reporter untuk Press TV Iran dituduh sebagai mata-mata oleh intelijen Turki. Shim dibunuh dalam kecelakaan mobil di Suruç pada bulan Oktober 2014. Blogger Turki yang berpengaruh, Ferdi Özmen, terbunuh di Istanbul pada Oktober 2014. Özmen adalah pendukung yang bersemangat terhadap kebijakan Mustafa Kemal Atatürk dan melakukan kritik terhadap pemerintahan Erdogan (Index of Censorship, 2019). Menurut World Press Freedom Index (2012), Turki menempati peringkat terendah dibandingkan 28 negara anggota Uni Eropa dan menempati peringkat 154 dari 178 negara di seluruh dunia dalam hal kebebasan pers pada tahun 2012 (World Press Freedom Index, 2012). Menurut Publikasi World Press Freedom Index (2012a), Turki memenjarakan total 72 personel media, di antaranya terdapat 42 wartawan dan empat asisten media sehubungan dengan pekerjaan media mereka. Menurut World Press Freedom Index (2012a), Turki menjadi penjara terbesar bagi wartawan yang merupakan sebuah paradoks yang menyedihkan bagi sebuah negara yang menggambarkan dirinya sendiri sebagai model negara demokrasi. Akibatnya, pada tahun 2013, Turki masih menempati peringkat terendah dibandingkan 28 negara anggota Uni Eropa dan menempati peringkat 154 dari 178 negara di seluruh dunia atau turun enam peringkat dibandingkan tahun sebelumnya dalam hal kebebasan pers (World Press Freedom Index, 2013).

No.	Negara	Peringkat tahun				
		2010	2011	2012	2013	2014
1	Finland	1	1	1	1	1
2	Netherlands	2	4	4	2	2
3	Luxembourg	14	7	7	4	4
4	Estonia	9	3	3	11	11
5	Austria	7	5	5	12	12
6	Sweden	3	12	12	10	10
7	Denmark	11	11	11	6	7
8	Ireland	9	15	15	15	16
9	Czech Rep	23	14	14	16	13
10	Germany	17	18	18	17	14
11	Belgium	14	20	20	21	23
12	Poland	32	24	24	22	19
13	Cyprus	45	16	16	24	25
14	Slovakia	35	27	27	23	20
15	United Kingdom	19	28	28	29	33
16	Lithuania	11	31	31	33	32
17	Portugal	40	33	33	28	30
18	Slovenia	46	36	36	35	34
19	Spain	39	39	39	36	35
20	France	44	38	38	37	39
21	Latvia	30	50	50	39	37
22	Hungary	23	40	40	56	64
23	Malta	14	58	58	45	51
24	Romania	52	49	49	42	45
25	Italy	49	61	61	57	49
26	Croatia	62	68	68	64	65
27	Serbia	85	80	80	63	54
28	Greece	70	71	71	84	99
29	Bulgaria	70	81	81	87	100
30	Albania	80	96	96	102	85
31	Macedonia	68	94	94	116	123
32	Montenegro	104	107	107	113	114
33	Turkey	138	148	154	154	154

Tabel 2. Peringkat Kebebasan Pers Negara Turki, Negara Anggota Uni

Eropa dan Negara Kandidat Anggota Uni Eropa tahun 2010-2014 (World Press

Freedom Index, 2010-2011)

Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2010-2014 Turki menempati peringkat terendah dibandingkan negara anggota Uni Eropa dan negara kandidat anggota Uni Eropa. Negara anggota Uni Eropa yang menempati peringkat terendah adalah Bulgaria dengan peringkat 70, 81, 81, 87, 100 dari 178 negara di dunia. Sedangkan negara kandidat anggota Uni Eropa yang menempati peringkat terendah adalah Montenegro dengan peringkat 104, 107, 107, 113, 114 dari 178 negara di dunia. Turki menempati peringkat jauh di bawah Bulgaria dan Montenegro, yakni dengan peringkat 138, 148, 154, 154, 154 dari 178 negara di dunia.

Turki mengalami praktik peradilan yang terus-menerus bersifat represif dan jumlah jurnalis yang ditahan masih pada tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sekitar 60 jurnalis ditahan pada akhir 2013, termasuk setidaknya 28 ditahan sehubungan dengan pekerjaan mereka, menjadikan Turki salah satu penjara terbesar di dunia bagi personel media (World Press Freedom Index, 2014). Akibatnya, pada tahun 2014, Turki masih menempati peringkat terendah dibandingkan 28 negara anggota Uni Eropa dan menempati peringkat 154 dari 178 negara di seluruh dunia dalam hal kebebasan pers (World Press Freedom Index, 2014a).

Uni Eropa juga menemukan permasalahan dalam bidang kebebasan berekspresi dalam media di Turki. Turki melalui Presidensi Komunikasi dan Telekomunikasi (TIB) melakukan

pemblokiran terhadap 44.000 situs web tanpa putusan pengadilan (Turkey Progress Report, 2014). Menurut Index of Censorship (2019), Turki melakukan pemblokiran web/media terbanyak dibandingkan 28 negara anggota Uni Eropa dan menempati peringkat terendah dibandingkan 28 negara anggota Uni Eropa dan 34 negara-negara di Eropa dalam hal kebebasan media selama tahun 2014-2018.

Turki berupaya menjamin kebebasan pers melalui pasal 28 pada konstitusinya yang terbaru. “Pers itu bebas, dan tidak boleh disensor. Pendirian rumah percetakan tidak perlu tunduk pada perizinan ataupun membayar kepada penjamin keuangan”. Meskipun undang-undang itu secara eksplisit menyatakan bahwa pers itu bebas dan tidak boleh disensor, namun demi kepentingan negara undang-undang tersebut tetap mengizinkan adanya tindakan penyensoran informasi yang dinilai mengancam keamanan negara dan pelanggaran yang menghasut permusuhan terhadap pemerintah (Mc Clain dan Waite-Wright, 2010). Sehingga wartawan/pekerja media yang dinilai memberikan ancaman terhadap keamanan nasional Turki dapat ditahan oleh otoritas Turki, seperti wartawan yang terlibat/mendukung kudeta. Begitu juga pada kasus penghinaan terhadap presiden Erdogan dan kritik kepada pemerintah dinilai sebagai ancaman terhadap keamanan negara dan menghasut permusuhan terhadap pemerintah negara Turki, sehingga dilakukan pemblokiran web/media. Secara keseluruhan,

Uni Eropa menilai Turki belum menjamin kebebasan berekspresi, kebebasan media dan hak warga negara untuk memperoleh akses informasi. (Turkey Progress Report, 2014)

Uni Eropa juga menemukan sebanyak dua kasus pembubaran asosiasi LGBT atas dasar apa yang disebut sebagai moralitas umum (Turkey Progress Report, 2014). Dalam hal penghormatan terhadap hak asasi LGBT, Turki menempati peringkat terendah dibandingkan dengan 28 negara anggota Uni Eropa dan peringkat ke 44 dari 48 negara-negara Eropa pada tahun 2012 (Rainbow Europe, 2012). Sedangkan pada tahun 2013, Turki masih menempati peringkat terendah dibandingkan dengan 28 negara anggota Uni Eropa dan peringkat ke 43 dari 48 negara-negara Eropa dalam hal penghormatan terhadap hak asasi LGBTTT (Rainbow Europe, 2013). Uni Eropa menilai Turki belum menjamin kebebasan berserikat dan melakukan diskriminasi atas LGBT. Uni Eropa menilai kewenangan aparat Turki terlalu besar dalam menangani masalah seksualitas LGBT. Menurut Uni Eropa seharusnya Turki membatasi kewenangan aparat dalam urusan seksual warga negara LGBT (Turkey Progress Report, 2014).

Peringkat	Negara	Skor pada tahun				
		2010	2011	2012	2013	2014
1	United Kingdom	8	12.5	21	77	82
2	Belgium	9	10	17	67	78
3	Spain	9	12	20	65	73
4	Sweden	10	12	18	65	65
5	Norway	9	10	15	66	68
6	Netherlands	9	10	16	60	70

7	Portugal	5	10	15	65	67
8	Iceland	8	9	14	56	64
9	France	5	5	6	64	64
10	Denmark	7	9	9	57	60
11	Germany	5	10	1	54	56
12	Croatia	4	6	10	48	56
13	Hungary	4	7	2	55	54
14	Austria	3	6	12	43	52
15	Finland	6	6	11	47	45
16	Malta	1	0	0	35	57
17	Ireland	3	5	12	36	34
18	Slovenia	4	5	9	35	35
19	Albania	2	2	6	38	38
20	Czech Republic	3	3	9	35	35
21	Montenegro	1	2	8	27	47
22	Greece	1	2	20	28	31
23	Switzerland	4	4	6.5	29	29
24	Estonia	2	2	2	29	35
25	Romania	3	2	6	31	28
26	Slovakia	2	1	9	27	31
27	Luxembourg	4	4	3	28	28
28	Serbia	1	2	6	25	30
29	Bulgaria	2	2	6	18	30
30	Andorra	7	4	3	21	21
31	Italy	1	0	9	19	25
32	Poland	0	1	2	22	28
33	Bosnia & Herzegovina	2	1	5	20	20
34	Lithuania	2	1	-1	21	22
35	Georgia	1	-1	-4	21	26
36	Latvia	0	0	2	20	20
37	Cyprus	0	-2	1	20	20
38	Kosovo	3	1	2.5	14	17
39	Liechtenstein	0	-2	1	16	18
40	Macedonia	0	-2	8	13	13
41	Belarus	-1	-3	-1	14	14
42	San Marino	0	-2	-3	14	14
43	Turkey	-1	-2	-3	14	14
44	Moldova	-1	-3	-4.5	10	17
45	Monaco	0	-2	-3	10	10
46	Ukraine	-2	-4	-4	12	12
47	Armenia	0	-2	-4	8	9
48	Azerbaijan	0	-2	-4	8	7

49	Russia	-2	-2	-4.5	7	6
----	--------	----	----	------	---	---

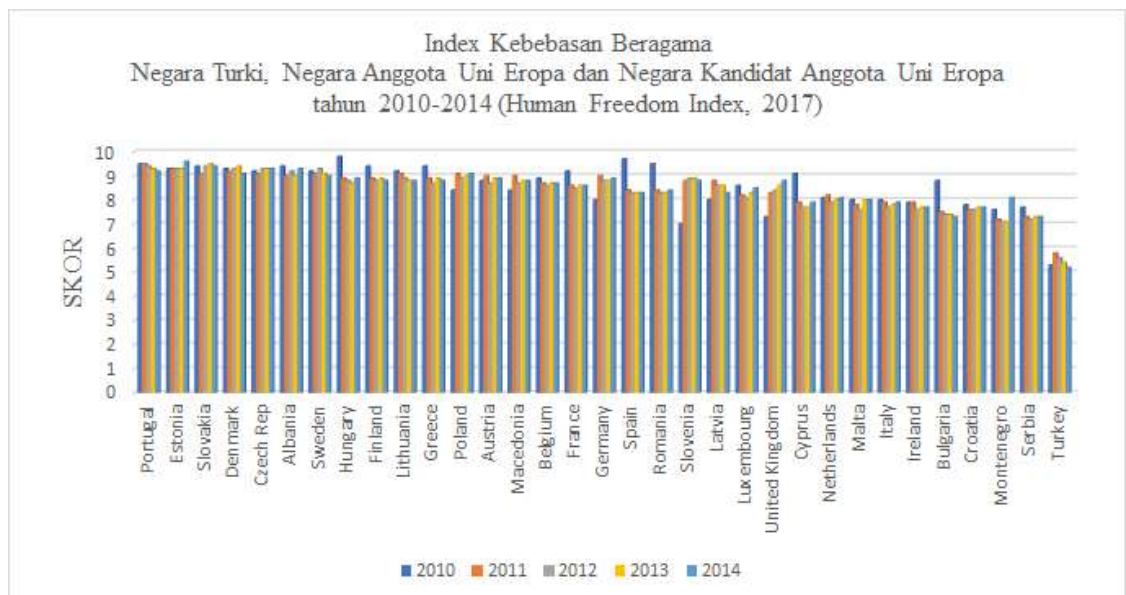
Tabel 3. Peringkat Penghormatan terhadap Hak Asasi LGBT Negara

Turki, Negara Anggota Uni Eropa, Negara Kandidat Anggota Uni Eropa dan 16 Negara Eropa tahun 2010-2014 (Rainbow Europe, 2010-2014)

Berdasarkan grafik di atas, pada tahun 2010-2014, Turki masih menempati peringkat terendah dibandingkan dengan 28 negara anggota Uni Eropa dan peringkat ke 43 dibandingkan 48 negara-negara Eropa dalam hal penghormatan terhadap hak asasi LGBTT (Rainbow Europe, 2014). Turki begitu ketat dalam hal LGBT. Uni Eropa mencatat ‘moralitas umum’ (Turkey Progress Report, 2014) yang menyebabkan Turki begitu ketat dalam hal LGBT yang didukung mayoritas publik Turki sebanyak 88,8% menolak LGBT (Yilmaz dan Birdal, 2012). Turki memang berupaya menjamin adanya kebebasan berekspresi dan kebebasan berpikir melalui pasal 26 pada konstitusinya yang terbaru. Namun tidak ada jaminan bagi para pelaku LGBT untuk menggunakan hak ini (Mc Clain dan Waite-Wright, 2010). Terlebih lagi mayoritas publik Turki juga menolak keberadaan LGBT. Hasil survey publik di Turki menyatakan bahwa hanya 11,2% saja publik Turki yang menyetujui LGBT sedangkan 88,8% menolak LGBT. Partai AKP yang berkuasa di Turki juga menolak memberikan dukungan terhadap kesetaraan hak LGBT (Yilmaz dan Birdal, 2012).

Uni Eropa juga menemukan permasalahan diskriminasi dalam kebebasan beragama. Seluruh Rumah Cemevis sebagai

rumah ibadah Alevis tidak diakui sebagai tempat ibadah secara resmi oleh Pemerintah Turki. Seluruh komunitas Alevis juga mengalami kesulitan perizinan dan urusan administrasi dalam mendirikan tempat ibadah baru. Menurut Presidensi Urusan Agama Turki, lazimnya rumah ibadah bagi islam adalah masjid (Turkey Freedom Index, 2014). Alevis sebagai aliran dalam islam yang berbeda dari agama islam lazimnya (Hurtas, 2018), yakni sunni orthodox, menyesali hasil akhir yang tidak sesuai harapan mereka (Turkey Progress Report, 2014). Menurut Human Freedom Index (2017) dalam hal penghormatan terhadap kebebasan beragama, Turki menempati peringkat terendah dibandingkan dengan 28 negara anggota Uni Eropa pada tahun 2012-2014.



Grafik 3. Index Kebebasan Beragama Negara Turki, Negara Anggota Uni Eropa dan Negara Kandidat Anggota Uni Eropa tahun 2010-2014 (Human Freedom Index, 2017)

Berdasarkan grafik di atas, pada tahun 2010-2014 Turki selalu menempati peringkat terendah dalam hal kebebasan beragama dibandingkan 28 negara anggota Uni Eropa dan negara kandidat anggota Uni Eropa (Human Freedom Index, 2017). Skor rata-rata Turki selama tahun 2010-2014 hanya sebesar 5.46, selisihnya cukup besar jika dibandingkan skor rata-rata negara anggota Uni Eropa yang mencapai 8,6 dan skor rata-rata negara kandidat anggota Uni Eropa yang mencapai 8,17. Diskriminasi agama di Turki juga terjadi dalam pelayanan tempat ibadah. Komunitas agama Alevis harus membayar tagihan listrik dan air untuk seluruh tempat ibadah mereka. Menurut Uni Eropa tempat ibadah seharusnya dibebaskan dari tagihan listrik dan air. Secara keseluruhan, Turki belum bisa menjamin kebebasan beragama, hak-hak non-muslim dan mencegah diskriminasi terhadap agama non-muslim, dalam hal ini agama Alevis. (Turkey Progress Report, 2014).

Biarapun begitu, Turki berupaya menjamin adanya kebebasan dalam beragama melalui pasal 10 pada konstitusinya yang terbaru (Mc Clain dan Waite-Wright, 2010). Hasil survey publik Turki menyatakan mayoritas publik Turki sebanyak 69% setuju dan menerima komunitas agama Alevis (Hurriyet, 2012). Erdogan pada akhirnya juga mengklaim ingin mengupgrade demokrasi Turki dan memberikan status legal untuk pembangunan rumah ibadah cemevis untuk kelompok agama Alevis (Hurriyet,

2018). Pada November 2018 pengadilan Turki akhirnya mengakui rumah cemevis sebagai rumah ibadah Alevi secara resmi. Pengadilan Banding memutuskan bahwa negara harus memenuhi biaya listrik cemevis, rumah ibadah Alevi, seperti halnya untuk masjid (Hurtas, 2018).

3.1.3. Upaya dan Hasil yang dicapai Turki untuk menyelesaikan permasalahan Demokrasi Tahun 2015-2016

Dalam upaya menyelesaikan persoalan hak asasi manusia, Turki menjamin konstitusinya untuk menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia dan hak-hak fundamental. Uni Eropa mencatat Turki telah melakukan upaya untuk melindungi hak-hak ekonomi kaum LGBT dalam bekerja. Pada November 2014, Pengadilan Turki membatalkan pemecatan guru karena alasan orientasi seksual (Turkey Progress Report, 2015). Uni Eropa mengapresiasi langkah tersebut. Namun Uni Eropa masih menemukan berbagai permasalahan hak asasi manusia.

Uni Eropa juga menemukan permasalahan diskriminasi dalam penghormatan terhadap hak fundamental terutama hak-hak lesbian, gay, biseksual, transgender, dan interseks (LGBTI). Uni Eropa menyayangkan adanya pembubaran parade LGBTI pada bulan Juni 2015 dengan cara paksa oleh aparat kepolisian.

Peringkat	Negara	Skor pada tahun						
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	United Kingdom	8	12.5	21	77	82	86	81
2	Belgium	9	10	17	67	78	83	82
3	Spain	9	12	20	65	73	69	71

4	Sweden	10	12	18	65	65	72	65
5	Norway	9	10	15	66	68	69	65
6	Netherlands	9	10	16	60	70	69	66
7	Portugal	5	10	15	65	67	67	70
8	Denmark	7	9	9	57	60	68	71
9	France	5	5	6	64	64	65	67
10	Iceland	8	9	14	56	64	63	59
11	Croatia	4	6	10	48	56	71	67
12	Malta	1	0	0	35	57	77	88
13	Finland	6	6	11	47	45	62	67
14	Germany	5	10	1	54	56	56	55
15	Austria	3	6	12	43	52	52	62
16	Hungary	4	7	2	55	54	50	51
17	Ireland	3	5	12	36	34	40	55
18	Greece	1	2	20	28	31	39	58
19	Montenegro	1	2	8	27	47	46	45
20	Albania	2	2	6	38	38	42	34
21	Luxembourg	4	4	3	28	28	43	50
22	Czech Republic	3	3	9	35	35	35	32
23	Slovenia	4	5	9	35	35	32	32
24	Estonia	2	2	2	29	35	34	36
25	Switzerland	4	4	6.5	29	29	28	33
26	Slovakia	2	1	9	27	31	29	29
27	Serbia	1	2	6	25	30	29	32
28	Romania	3	2	6	31	28	28	23
29	Andorra	7	4	3	21	21	31	32
30	Bulgaria	2	2	6	18	30	27	24
31	Georgia	1	-1	-4	21	26	36	30
32	Bosnia & Herzegovina	2	1	5	20	20	29	29
33	Poland	0	1	2	22	28	26	18
34	Italy	1	0	9	19	25	22	20
35	Cyprus	0	-2	1	20	20	18	32
36	Kosovo	3	1	2.5	14	17	18	32
37	Lithuania	2	1	-1	21	22	19	18
38	Latvia	0	0	2	20	20	18	17
39	Liechtenstein	0	-2	1	16	18	19	18
40	Macedonia	0	-2	8	13	13	13	16
41	San Marino	0	-2	-3	14	14	14	14
42	Belarus	-1	-3	-1	14	14	14	13
43	Moldova	-1	-3	-4.5	10	17	16	14
44	Turkey	-1	-2	-3	14	14	12	9
45	Monaco	0	-2	-3	10	10	11	11
46	Ukraine	-2	-4	-4	12	12	10	13
47	Armenia	0	-2	-4	8	9	9	7

48	Russia	-2	-2	-4.5	7	6	8	7
49	Azerbaijan	0	-2	-4	8	7	5	5

Tabel 4. Peringkat Penghormatan terhadap Hak Asasi LGBT Negara

Turki, Negara Anggota Uni Eropa, Negara Kandidat Anggota Uni Eropa dan 16 Negara Eropa tahun 2010-2016 (Rainbow Europe, 2010-2016)

Berdasarkan grafik dia atas, dalam hal penghormatan terhadap hak asasi LGBT, Turki menempati peringkat terendah dibandingkan dengan 28 negara anggota Uni Eropa dan peringkat ke 44 dibandingkan 48 negara-negara Eropa pada tahun 2010-2016 (Rainbow Europe, 2016). Sistem disiplin angkatan bersenjata juga masih mendefinisikan homoseksualitas sebagai 'gangguan psikoseksual' dan peraturan medis militer yang menyatakan homoseksual sebagai penyakit. Sedangkan pada tahun 2016, Turki masih menempati peringkat terendah dibandingkan dengan 28 negara anggota Uni Eropa dan peringkat ke 47 dari 48 negara-negara Eropa pada tahun 2016 (Rainbow Europe, 2016). Uni Eropa menilai Turki belum menjamin kebebasan berserikat, kebebasan berekspresi dan mencegah diskriminasi terhadap LGBTI (Turkey Progress Report, 2015). Turki memang berupaya menjamin adanya kebebasan berekspresi dan kebebasan berpikir melalui pasal 26 pada konstitusinya yang terbaru. Namun tidak ada jaminan bagi para pelaku LGBT untuk menggunakan hak ini (Mc Clain dan Waite-Wright, 2010). Terlebih lagi mayoritas publik Turki juga menolak keberadaan LGBT. Hasil survey publik di Turki menyatakan bahwa hanya 11,2% saja publik Turki yang menyetujui LGBT

sedangkan 88,8% menolak LGBT. Partai AKP yang berkuasa di Turki juga menolak memberikan dukungan terhadap kesetaraan hak LGBT (Yilmaz dan Birdal, 2012).

Uni Eropa menemukan permasalahan dalam hal kebebasan media dan kebebasan berekspresi. Tercatat hingga bulan Juli 2015, dua saluran TV yang kritis terhadap pemerintah ditutup paksa oleh polisi. Pemerintah Turki melalui Presidensi Komunikasi dan Telekomunikasi (TIB) juga memblokir 76.000 website tanpa putusan pengadilan (Turkey Progress Report, 2015). Menurut Index of Censorship (2019), Turki melakukan pemblokiran web/media terbanyak dibandingkan 28 negara anggota Uni Eropa dan menempati peringkat terendah dibandingkan 28 negara anggota Uni Eropa dan 34 negara-negara di Eropa dalam hal kebebasan media selama tahun 2014-2018. Uni Eropa menilai Turki belum menjamin kebebasan media dan kebebasan berekspresi (Turkey Progress Report, 2015).

Pada tahun 2016, Uni Eropa masih menemukan berbagai permasalahan hak asasi manusia dalam hal kebebasan pers, media dan kebebasan berekspresi. Pemerintah Turki kembali melakukan pemblokiran website secara besar-besaran. Hingga Juni 2016, Turki telah memblokir sebanyak 108.000 website tanpa putusan pengadilan (Turkey Progress Report, 2016). Menurut Index of Censorship (2019), Turki melakukan pemblokiran web/media terbanyak dibandingkan 28 negara anggota Uni Eropa dan

menempati peringkat terendah dibandingkan 28 negara anggota Uni Eropa dan 34 negara-negara di Eropa dalam hal kebebasan media pada tahun 2014-2018. Ditambah lagi, sejak 2015 lebih dari 2.500 wartawan kehilangan pekerjaan dan investigasi kriminal diluncurkan terhadap surat kabar yang kritis terhadap pemerintah (Turkey Progress Report, 2016).

No.	Negara	Peringkat pada tahun						
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Finland	1	1	1	1	1	1	1
2	Netherlands	1	4	4	2	2	4	2
3	Denmark	11	11	11	6	7	3	4
4	Sweden	1	12	12	10	10	5	8
5	Austria	7	5	5	12	12	7	11
6	Estonia	9	3	3	11	11	10	14
7	Luxembourg	14	7	7	4	4	19	15
8	Ireland	9	15	15	15	16	11	9
9	Germany	17	18	18	17	14	12	16
10	Czech Rep	23	14	14	16	13	13	21
11	Belgium	14	20	20	21	23	15	13
12	Slovakia	35	27	27	23	20	14	12
13	Poland	32	24	24	22	19	18	47
14	Lithuania	11	31	31	33	32	31	35
15	United Kingdom	19	28	28	29	33	34	38
16	Portugal	40	33	33	28	30	26	23
17	Cyprus	45	16	16	24	25	24	81
18	Spain	39	39	39	36	35	33	34
19	Latvia	30	50	50	39	37	28	24
20	Slovenia	46	36	36	35	34	35	40
21	France	44	38	38	37	39	38	45
22	Malta	14	58	58	45	51	48	46
23	Romania	52	49	49	42	45	52	49
24	Hungary	23	40	40	56	64	65	67
25	Italy	49	61	61	57	49	73	77
26	Croatia	62	68	68	64	65	58	63
27	Serbia	85	80	80	63	54	67	59
28	Greece	70	71	71	84	99	91	89
29	Albania	80	96	96	102	85	82	82
30	Bulgaria	70	81	81	87	100	106	113
31	Macedonia	68	94	94	116	123	117	118

32	Montenegro	104	107	107	113	114	114	106
33	Turkey	138	148	154	154	154	149	151

Tabel 5. Peringkat Kebebasan Pers Negara Turki, Negara Anggota Uni

Eropa dan Negara Kandidat Anggota Uni Eropa tahun 2010-2016 (World Press

Freedom Index, 2010-2016)

Berdasarkan grafik di atas, dalam hal kebebasan pers pada tahun 2010-2016, Turki menempati peringkat terendah dibandingkan 28 negara anggota Uni Eropa, dan negara kandidat anggota Uni Eropa. Turki menempati peringkat 149 dari 179 negara di seluruh dunia pada tahun 2015 (World Press Freedom Index, 2015) dan menempati peringkat 151 dari 179 negara di seluruh dunia pada tahun 2016 (World Press Freedom Index, 2016).

Turki berupaya menjamin kebebasan pers melalui pasal 28 pada konstitusinya yang terbaru. “Pers itu bebas, dan tidak boleh disensor. Pendirian rumah percetakan tidak perlu tunduk pada perizinan ataupun membayar kepada penjamin keuangan”. Meskipun undang-undang itu secara eksplisit menyatakan bahwa pers itu bebas dan tidak boleh disensor, namun demi kepentingan negara undang-undang tersebut tetap mengizinkan adanya tindakan penyensoran informasi yang dinilai mengancam keamanan negara dan pelanggaran yang menghasut permusuhan terhadap pemerintah (Mc Clain dan Waite-Wright, 2010). Sehingga wartawan/pekerja media yang dinilai memberikan ancaman terhadap keamanan nasional Turki dapat ditahan oleh otoritas Turki, seperti wartawan

yang terlibat/mendukung kudeta. Begitu juga pada kasus penghinaan terhadap presiden Erdogan dan kritik kepada pemerintah dinilai sebagai ancaman terhadap keamanan negara dan menghasut permusuhan terhadap pemerintah negara Turki, sehingga dilakukan pemblokiran web/media. Uni Eropa menilai Turki belum menjamin kebebasan media, dan kebebasan berekspresi (Turkey Progress Report, 2016).